

Nama : Vika Janfira

NPM : 2213053040

Kelas : 2B

Post Test

Analisis Jurnal

A. Identitas Jurnal

1. Nama Jurnal : Jurnal Penelitian Politik

2. Halaman : 69-81

3. Volume : Vol. 16

4. Nomor : No. 01

5. Tahun Terbit : Juni 2019

6. Judul Jurnal : Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019

7. Nama Penulis : R. Siti Zuhro

8. Kata Kunci : Pendalaman Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, Pemerintahan Efektif, Membangun Kepercayaan

B. Isi Jurnal

> Memperdalam Demokrasi dan Tantangannya

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, rakyat, dan untuk rakyat. Namun, menyadari bahwa makna bukanlah tugas yang mudah karena demokrasi membutuhkan proses yang panjang dan tahapan penting yang harus dilewati, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti yang dinyatakan Laurence Whitehead (1989), mengkonsolidasikan demokrasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan komitmen semua lapisan masyarakat terhadap aturan demokrasi. Pelaksanaan pemilihan presiden pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari realisasi prinsip-prinsip demokrasi, yang mencakup jaminan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan individu, terutama dalam hak-hak politik. Dalam konteks ini, pemilihan presiden langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut dari jaminan hak-hak politik. Tidak dapat disangkal bahwa persaingan dan kontestasi dalam pemilihan presiden melalui kampanye diwarnai oleh kebisingan tinggi yang terjadi di media massa dan media sosial (medsos). Emosi publik sering terlibat dan mengundang perhatian khusus karena tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya harus berurusan dengan hukum. Menkopolkam, Wiranto, misalnya, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2018 ada 53 kasus hoaks dan 324 pidato kebencian yang terjadi dan beberapa telah diselesaikan secara hukum.

> Pemilihan Presiden 2019 dan Masalahnya

Pemilihan simultan 2019 adalah pemilihan kelima pasca-New Order dan pemilihan simultan pertama yang mengadakan pemilihan legislatif dan presiden pada saat yang bersamaan. Tidak seperti pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi uji coba penguatan sistem presidensial, melembagakan partai politik, serta mengukur serta memformat koalisi partai. Untuk memenuhi itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, tidak hanya secara prosedural tetapi juga substantif. Dengan kata lain, pemilihan presiden dan legislatif 2019 perlu

ditanggapi dengan cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijaksana, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

> Politik Identitas: Bersaing untuk Suara Muslim

Pemilu simultan 2019 tidak kebal terhadap isu identitas dan politisasi agama. Fenomena identitas dan politisasi agama juga diwarnai dengan bersaing memperebutkan suara Muslim. Munculnya sejumlah isu oleh beberapa umat Islam dipandang merugikan mereka dan akhirnya melahirkan gerakan ijtima'ulama untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hasil ijtima', yang meliputi perwakilan ulama sebagai penantang petahana, merekomendasikan Prabowo untuk memilih calon wakil presiden yang berasal dari kalangan ulama (pasangan calon presiden dan wakil presiden tipe nasionalis-religius). Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, bersaing untuk mendapatkan suara Muslim adalah logis dan selalu terjadi di setiap pemilihan. Meskipun dikotomi santri-abangan cenderung lebih cair, pendapat tentang pentingnya pasangan kandidat yang mewakili santri dan abangan masih cukup kuat. Namun, itu belum tentu memberikan jaminan kemenangan.

> Pemilihan dan Kegagalan Partai Politik

Pemilu tidak hanya penanda suksesi kepemimpinan tetapi juga koreksi atau evaluasi pemerintah dan proses pendalaman demokrasi untuk meningkatkan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dalam proses konsolidasi, partai politik sebagai aktor utama dalam pemilihan idealnya dapat menjalankan fungsinya sebagai penyedia pemimpin kandidat. Namun, ketika fungsi partai tidak maksimal, proses konsolidasi demokrasi terhambat. Hal ini dapat dilihat pada pemilu 2019 di mana banyak partai politik yang gagal dalam proses kader. Hal ini dapat dilihat dari partai-partai yang merajalela yang memilih untuk mencalonkan selebriti sebagai kandidat legislatif. Tujuannya adalah untuk menjadikan selebriti sebagai pengubah suara untuk partai dalam pemilihan.

> Pemilu dalam Masyarakat Plural

Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Jika legislator terpilih tidak bekerja dengan baik, rakyat akan mempunyai pilihan untuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya. Pemilu juga signifikan untuk lebih mengenalkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen. Sudah tentu ada sejumlah ruang yang harus diisi untuk perbaikan-perbaikan, namun hal yang pasti adalah demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini.